

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999

Indra Ismawan, *Harta dan Yayasan*, Bandung, Pressindo, 2007

Nasir Kusnandar, *Hak dan Kewajiban Pengurus Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum*, Jakarta, Salemba IV, 2010

Habib Adjie, *Q & A : Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Yayasan*, Surabaya, 2019

Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : “*Status Hukum Dari Yayasan Dalam Kaitanya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha Di Indonesia*”

Chatmarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Muchtar Rasmantio, *Tata Cara Pendirian Yayasan Sebagai Badan Usaha Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Esteile Philips, *Researching and Writing in Law, Lawbook, Sidney*, 2002. Hal 164. dalam Rusdianto Sesung “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1984

Muhammad Yamin & Abdul Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004

John Salindo, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016

Habib Adji, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi Nomor 28 Th. III*, 2005

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Mr.A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda)*, PT intermasa, Jakarta, 1978

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian, Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, 2014

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Caetur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016

Sufri Nuryamin, *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*, Bantul, 2016

Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012

Sufri Nuryamin, *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*, Bantul, 2016

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ( Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2015

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002

Supriadi, *Hukum Agraria. Pendapat lain menyatakan bahwa disebut sebagai hak yang bersifat sementara karena eksistensinya pada suatu saat nanti akan dihapuskan, karena mengandung sifat-sifat yang kurang baik bertentangan dengan jiwa UUPA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

M. Rizal Akbar dkk, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru, 2005

Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009)

Purwaning M. Yanuar, *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta

Darmadji. M dan M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2001

Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang – Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang *Yayasan*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Barang Milik Negara/Daerah*

*Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang  
Milik Daerah*

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

*Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang  
Pengelolaan Barang Milik Daerah*

*Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Aset Pemerintah  
Kota Surabaya*

